

Model Pengembangan Kampung sebagai Desa Inovatif (Studi Kasus Kota Palembang)

Dedi Rianto Rahadi
Email : dedi1968@yahoo.com
Program Studi Manajemen
Fakultas Bisnis, Universitas Presiden

ABSTRAK

Desa inovatif adalah desa yang warga masyarakatnya mampu mengenali dan mengatasi serta memanfaatkan teknologi canggih atau cara-cara baru untuk mengatasi masalah dan meningkatkan perekonomiannya dengan cara menggunakan teknologi yang ada di sekitar lingkungannya secara mandiri. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model kampung sebagai sebagai desa inovatif. Obyek penelitian di kota Palembang dan metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan dibutuhkan model pengembangan desa inovatif dengan pendekatan keunggulan kompetitif masing-masing disetiap desa yang ada di kota Palembang. Kemiskinan sulit untuk dihilangkan tetapi dengan mengedepankan keunggulan masing-masing setiap kepala keluarga diharapkan masyarakat menjadi mandiri. Desa inovatif di kota Palembang dikembangkan pada desa-desa dengan tingkat kemiskinan paling tinggi yaitu Kecamatan Seberang Ulu I dengan model keterlibatan semua unsur terkait antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat.

Kata Kunci : Desa Inovatif, Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

The village is a village resident innovative society able to recognize and address as well as the use of advanced technology or new ways to tackle the problem and improve the economy by way of using existing technology around his environment independently. This study aims to develop a model village as a village innovative. The research object in Palembang and the research methods used by kualitatif descriptive approach. The results showed an innovative rural development model is needed to approach the competitive advantage of each in every village in Palembang. Poverty is difficult to remove, but with the advantages of each mengedepankan each household expected by society to be independent. Innovative village in Palembang developed in villages with the highest poverty levels the District Seberang Ulu I model with the involvement of all relevant elements between the government, employers and society.

Keywords: Innovative Rural Poverty, Empowerment

1. Latar Belakang

Provinsi Sumsel akan lebih fokus menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai 12,75 persen pada tahun 2016 (Babbeda, 2016). Hal ini didasari informasi kemiskinan tahun 2014 angka kemiskinan di Sumsel tercatat sebesar 13,62 persen. Angka tersebut dinilai masih

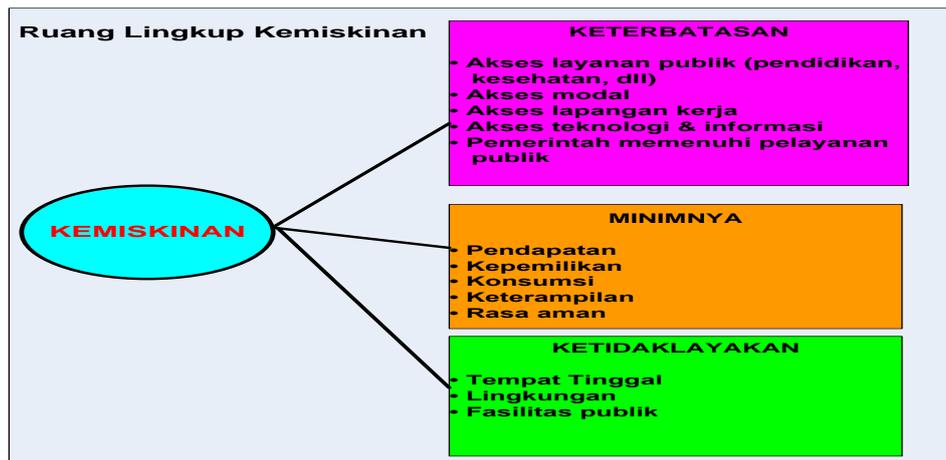
tinggi. Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sumsel berada di peringkat enam secara nasional untuk tingkat kemiskinan penduduk. Pada 2015 tingkat kemiskinan menjadi 14,25 persen, kenaikan angka kemiskinan sebagai dampak dari merosotnya harga komoditas-komoditas unggulan Sumatera Selatan. Berdasarkan jumlah penduduk miskin terbanyak, ditetapkan 6 kabupaten/kota menjadi prioritas dalam penanggulangan kemiskinan secara bersama-sama. Yakni, Palembang (205.988 jiwa), Ogan Komering ilir (121.424 jiwa), Muara Enim (108.199 jiwa), Musi Banyuasin (107.175 jiwa), Musi Rawas (98.782 jiwa) dan Banyuasin (97.138 jiwa). Pengulangan kemiskinan harus melibatkan semua komponen pemerintah daerah dan sektor swasta serta masyarakat sehingga solusi yang akan diterapkan dapat berjalan secara optimal dengan mengedepankan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tersebut. Membangun suatu masyarakat yang mandiri dan unggul dari semua aspeknya: pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Dari uraian diatas tujuan penelitian adalah mengembangkan model kampung sebagai sebagai desa inovatif ?

2. Landasan Teori

Indikator Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Indikator kemiskinan menurut Bappenas (2006) adalah terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi, terbatasnya akses terhadap air bersih, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, lemahnya jaminan rasa aman, lemahnya partisipasi, dan besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga. Berdasarkan berbagai definisi tersebut di atas, maka indikator utama kemiskinan adalah (1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (4) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; (5) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha dan perbedaan upah; (6) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (7) terbatasnya akses terhadap air bersih; (8) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (9) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; (10) lemahnya jaminan rasa aman; (11) lemahnya partisipasi; (12) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (13) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi, dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat. Dari uraian di atas ruang lingkup kemiskinan dapat diperjelas pada gambar 1 dibawah ini :



Gambar 1 Ruang Lingkup Kemiskinan (Bappenas 2016)

3. Metode Penelitian

Penelitian termasuk dalam penelitian exploratory karena pengetahuan topik tersebut yang terakumulasi melalui riset-riset sebelumnya. Menurut Singarimbun dan Effendy (1995 : 4) penelitian eksplanatori (explanatory research) merupakan penelitian penjelasan yang menyoroti hubungan kausal antara variable-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan obyek penelitian, dengan aspek-aspek keperilakuan memegang peran vital dalam proses pertukaran antar partner, maka penelitian ini menggunakan strategi riset case study. Yin (1994) menyatakan bahwa case study adalah satu-satunya metode yang sesuai untuk menangkap subyek yang kompleks.

Adapun obyek penelitian di kota Palembang dikarenakan tingkat kemiskinan paling tinggi diantara kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Selatan (Bappeda Sumsel, 2016). Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan dukungan informan yaitu ketua Rukun Tetangga (RT), Lurah dan Camat. Jumlah responden yang akan sebanyak 10 orang kepala keluarga dengan kriteria, memiliki usaha dan atau memiliki ketrampilan. Data primer berupa transkrip *in-depth interview* dan *focus group discussion* dengan berbagai partisipan, data observasi lapangan tentang potensi desa dan aspirasi masyarakat. Pertanyaan yang diajukan terkait kemiskinan yang ada dilingkungan wilayah serta potensi yang dimiliki daerah tersebut.

4. Pembahasan

Profil Kota Palembang

Pada tabel 1 menunjukkan jumlah penduduk mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah kemiskinan.

Tabel 1 Jumlah, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman, Indeks Keparahan dan Garis Kemiskinan Kota Palembang Tahun 2008-2014

Indikator Kemiskinan	Indikator Kemiskinan						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Penduduk(000)	235.27	211.80	218.50	210	206.50	206	202.31
Persentase Penduduk Miskin (%)	16.66	14.75	15	14.30	13.59	13.36	12.93
Indeks Kedalaman Kemiskinan	3.09	2.39	2.67	2.87	2.23	2.03	2.01
Indeks Keparahan Kemiskinan	0.87	0.63	0.74	0.85	0.60	0.46	0.40
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	244 223	294 174	315 634	344 939	366 689	392 560	405 037

Sumber : BPS Kota Palembang, 2015

Pada Tabel 2 juga menunjukkan jumlah penduduk kota sebanyak 1.535.000 dan terbanyak pada kecamatan Seberang Ulu I dan didaerah tersebut juga tingkat kemiskinan cukup tinggi

Tabel 2 Jumlah Penduduk Kota Palembang Tahun 2010-2014

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
	2013	2013	2013
Ilir Barat II	32 877	32 628	65 505
Gandus	30 897	30 110	61 007
Seberang Ulu I	86 510	81 270	167 780
Kertapati	41 938	41 427	83 365
Seberang Ulu II	48 528	48 567	97 095
Plaju	40 788	40 354	81 142
Ilir Barat I	66 773	66 463	133 236
Bukit Kecil	22 095	22 025	44 120
Ilir Timur I	33 468	35 562	69 030
Kemuning	41 595	42 955	84 550
Ilir Timur II	81 404	82 158	163 562
Kalidoni	53 753	53 993	107 746
Sako	44 253	44 397	88 650
Sematang Borang	18 089	17 885	35 974
Sukarami	77 322	77 779	155 101
Alang-alang Lebar	48 710	49 327	98 037
Kota Palembang	769 000	766 900	1 535 900

Sumber : BPS Kota Palembang, 2015

Solusi Kemiskinan

Hasil analisis SWOT, memperlihatkan salah satu kekuatan yang dimiliki kota Palembang diantaranya, sebagai ibu kota provinsi Sumatera selatan, dukungan pemerintah dan infrastruktur yang lengkap, dukungan pengusaha. Salah satu kelemahan diantaranya memiliki jumlah penduduk yang besar dan tingkat kemiskinan yang tinggi, potensi masyarakat belum dikelola secara optimal. Peluang yang dimiliki masuknya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), peluang untuk menjadi *entrepreneur* relatif besar dan sebagai ibu kota provinsi Sumatera selatan. Ancaman, diantaranya tingkat urbanisasi yang cukup tinggi.

Dari hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan perangkat pemerintah, mulai dari Rukun Tetangga (RT), kelurahan, kecamatan, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan masyarakat desa serta didukung dari analisis SWOT dapat disimpulkan, bahwa pengentasan kemiskinan diawali dengan pembangunan ekonomi berbasis kearifan lokal yang akan diimplementasikan melalui *cluster project* pada daerah-daerah yang menjadi prioritas,

misalnya Kota Palembang sebagai daerah yang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi. Kota Palembang memiliki potensi ekonomi dan karakteristik yang bisa dikembangkan lebih jauh, sehingga akan memperkaya konsep pengembangan ekonomi lokal yang berbasis klaster yang dimulai dari sektor UKM. Salah satu upaya untuk lebih mendorong perekonomian lokal adalah mendorong pengembangan diawali dari tingkat kelurahan/desa dengan berbasis pada kearifan lokal, potensi sumber daya dan keunikannya. Kelurahan/desa yang mampu mendayagunakan sumber dayanya dengan cara yang berbeda dikembangkan menjadi “**kampung/desa inovatif**”. Hal ini bertujuan agar proses inovasi yang dilakukan itu mampu diterima dan diaplikasi dengan mudah oleh warga setempat. Profil yang hendak dicapai dari kota Palembang adalah menjadikan sebuah kampung/desa sebagai desa percontohan, yaitu kemandirian ekonomi dan keunggulan komoditi lokal melalui inovasi dan penerapan teknologi; keunggulan dalam taraf pendidikan masyarakat; *eco-village* dan *zero waste technology*; kemandirian energi berbasis sumber daya lokal (*Green Energy*); *green and healthy living* serta sentra tanaman herbal; dan *eco-tourism*.

Kekuatan utama yang harus ditekankan adalah ciri khas lokal yang tidak akan pernah ditemukan sama di daerah lain. Dengan mengerti tentang ciri khas yang dimiliki, perguruan tinggi atau pemerintah akan lebih mudah mengimplementasikan karyanya karena masyarakat yang resisten relatif sedikit. Adapun ketersediaan informasi sangat dibutuhkan ketika masyarakat ingin mengembangkan inovasi baru yang mereka terima. Pengembangan potensi desa harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang mandiri, dengan meniscayakan adanya peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi, penguatan tata kelola lembaga di desa lebih efisien dan efektif, pemberdayaan masyarakat dan potensi desa, pemanfaatan teknologi, dan jejaring kerjasama secara terus menerus dan berkesinambungan. Salah satu diantara upaya tersebut adalah melalui program inovasi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui cara, proses, dan produk baru yang memberikan nilai tambah bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat desa dengan mendorong perekonomian lokal melalui pengembangan tingkat desa dengan berbasis pada kearifan lokal, potensi sumber daya dan keunikannya. Desa-desa yang mampu mendayagunakan sumber dayanya dengan cara yang berbeda menuju desa inovatif dengan cara yang baru berdasarkan Ipteks serta kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat. Kemajuan desa dan peningkatan taraf hidup masyarakat pada desa inovasi ini melibatkan segenap unsur desa pada empat pilar.

- 1) Pelayanan Publik, pelayanan dasar administrasi, pendidikan dan kesehatan,
- 2) Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan menjadi sektor terpadu dengan sentuhan IPTEKS,
- 3) UMKM sesuai potensi desa dan
- 4) Sarana dan Prasarana, pembangunan dengan memanfaatkan berbagai program secara terpadu.

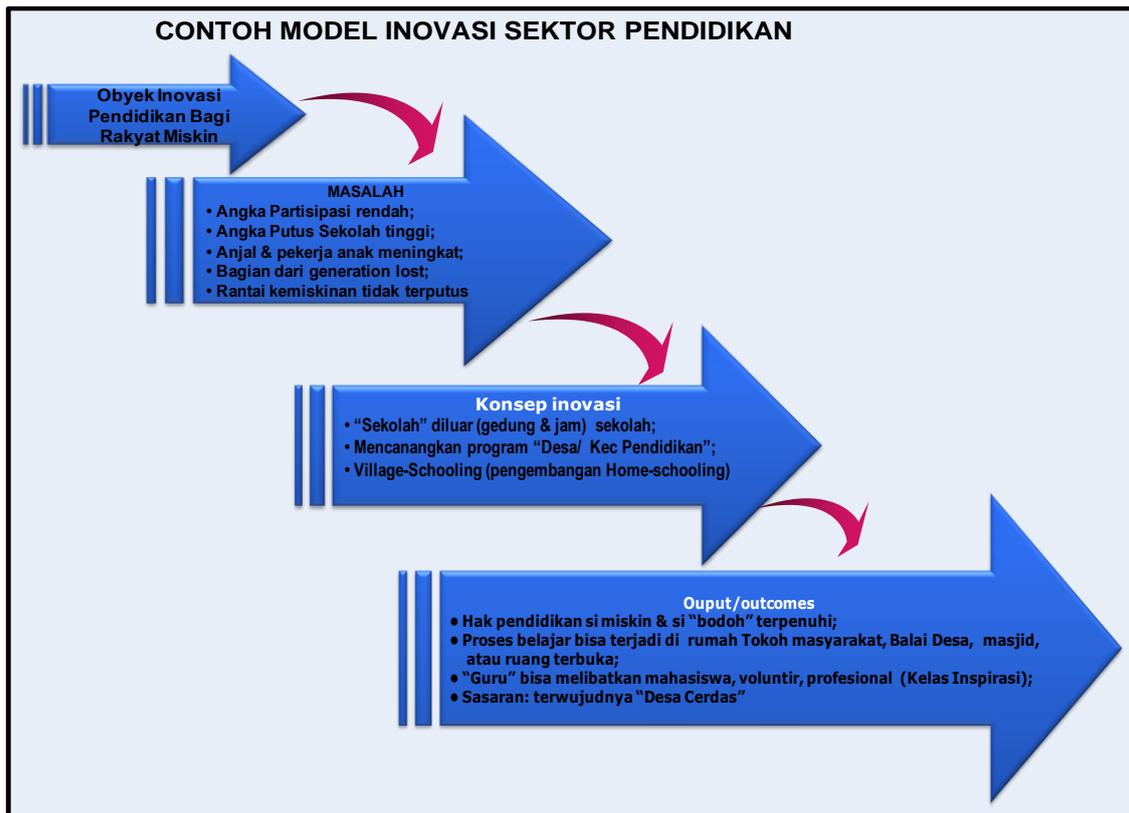
Dengan empat pilar ini, desa diharapkan mampu menciptakan cara, proses dan produk baru yang memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat dan kemanusiaan secara keseluruhan melalui kekuatan Inovasi. Dari sinilah akan muncul potensi dan produk unggulan desa yang mampu diandalkan. Dengan ditopang pengembangan dan penerapan Iptek berbasis pada kebutuhan pengembangan desa, maka potensi unggulan tersebut dapat ditransformasikan dan menjadi salah satu komponen kemandirian dan kesejahteraan desa yang jika dikelola dengan baik dan terjalin kerjasama antar pihak terkait, maka desa dapat mencapai tingkat kemajuan yang dicita-citakan. Karena potensi dan kemajuan pembangunan desa tidak sama, maka diperlukan diinventarisasi desa-desa yang potensial untuk dikembangkan menjadi kampung/desa inovatif.

Desa inovatif adalah desa yang warga masyarakatnya mampu mengenali dan mengatasi serta memanfaatkan teknologi canggih atau cara-cara baru untuk mengatasi masalah dan meningkatkan perekonomiannya dengan cara menggunakan teknologi yang ada di sekitar lingkungannya secara mandiri. Program ini bertujuan agar masyarakat dapat menuju kehidupan yang mandiri dan sejahtera. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 72/2005 tentang Desa. Karenanya, dukungan pemerintah maupun stakeholder diperlukan guna mengantarkan masyarakat desa pada perikehidupan layak, makmur, dan sejahtera. Dalam hal ini, diperlukan adanya inovasi-inovasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Inovasi yang dimaksud adalah upaya menciptakan cara, proses, dan produk baru yang memberikan nilai tambah bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi kunci pengembangan desa, tanpa inovasi pengelolaan potensi dengan cara biasa akan menghasilkan sesuatu yang biasa pula.

Beberapa contoh model desa/kampung inovasi yang dapat dilakukan, diantaranya: Inovasi Pendidikan Untuk si Miskin; Inovasi Pemanfaatan Lahan Kosong; Inovasi Penataan Pasar Tradisional; Inovasi Berbasis Desa/Kampung : Kampung/Desa Wisata-Budaya; Kampung/Desa Sadar Hukum; Kampung/Desa Sadar & Terampil; Kampung/Desa Sehat; Kampung/Desa Sahabat Anak; Kampung/Desa Ramah Lingkungan Alam; Kampung/Desa Wirausaha; Kampung/Desa Aman Bencana; Kampung/Desa KB; Kampung/Desa Gaul.

Teknis model kampung/desa inovasi diawali dengan skala prioritas permasalahan yang ada di daerah tersebut. Misalnya untuk sektor pendidikan. Berikutnya uraikan kondisi permasalahan yang ada, misalnya angka putus sekolah anak relatif cukup tinggi, masih banyak anak yang bekerja disektor informal yang terlihat semakin banyaknya anak jalanan (anjol), partisipasi keluarha terdaf keperdulian pendidikan sangat minim dan sebagainya. Dari uraian permasalahan yang ada, solusi inovasi apa yang diinginkan, misalnya konsep pendidikan diluar jam sekolah sehingga masih bisa untuk memperoleh “pendapatan” untuk membantu keluarga, mencanangkan kampung/desa pendidikan, mengembangkan home scholling dan sebagainya. Setelah memilih solusi inovasi sesuai dengan kebutuhan “mereka”, maka output yang diharapkan diantaranya pendidikan bagi rakyat miskin dapat terpenuhi, proses pendidikan dapat berlangsung diwilayah tersebut secara berkesimbangan dengan pendampingan oleh pemerintah maupun sukarelawan, terwujudnya “kampung/desa cerdas segera terpenuhi”. Uraian diatas dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini :



Gambar 2 Contoh Model Inovasi sektor Pendidikan

Model inovasi akan berhasil dijalankan apabila ada peran serta serta koordinasi yang baik dari semua pemangku kepentingan, misalnya pihak , rukun tetangga (RT), kelurahan, kecamatan, SKPD terkait hal dilakukan untuk menyamakan persepsi bahwa pengentasan kepentingan adalah salah bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Peran serta pemerintah dapat dilaksanakan dengan mengandeng pihak ketiga, misalnya perguruan tinggi (PT), organisasi kemasyarakatan, UKM maupun stakeholder lainnya. Pihak ketiga bertugas untuk melakukan analisis guna menentukan dan memetakan kondisi sosial masyarakat serta UKM yang ada dilingkungan masyarakat. Dari hasil kegiatan pemetaan tersebut akan dibuat skala prioritas dan kesekapatan antara masyarakat dengan pemerintah daerah setempat guna menentukan konsep inovasi yang diinginkan dan sesuai dengan kerifan lokal daerah masing-masing. Setelah dipahami dan disepakati potensi dan produk unggulan yang sangat berpotensi untuk mendorong pembangunan di desa tersebut, maka kemudian para pemuda, perangkat desa dan pihak-pihak yang terkait membicarakan hal ini dengan warga di desa tersebut Dalam perkumpulan atau rembug desa tersebut disusunlah program-program pengembangan desa, \dengan menggunakan asset lokal yang sudah ada. Kegiatan difokuskan pada potensi lokal yang ada dan pemberdayaan masyarakat setempat. Program-program disusun mulai dari program hulu (sarana dan prasarana, perbaikan budidaya dll) sampai hilir (pengolahan, pemasaran dll). Bentuk pemasaran juga perlu didiskusikan dalam rembug desa tersebut.

Hasil kesepakatan tersebut digunakan untuk membuat perencanaan perencanaan inovasi. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan sekali guna mendukung keberhasilan konsep inovasi yang telah disepakati.

Perencanaan, kesiapan infrastruktur serta dukungan sumber daya manusia yang baik akan memberikan hasil yang optimal dalam mewujudkan “kampung/desa inovatif”. Implementasi kegiatan akan didampingi PT, organisasi kemasyarakatan agar “kampung/desa inovatif” dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pada akhirnya selama proses berjalannya “kampung/desa inovatif” dilakukan evaluasi dan monitoring oleh pemerintah

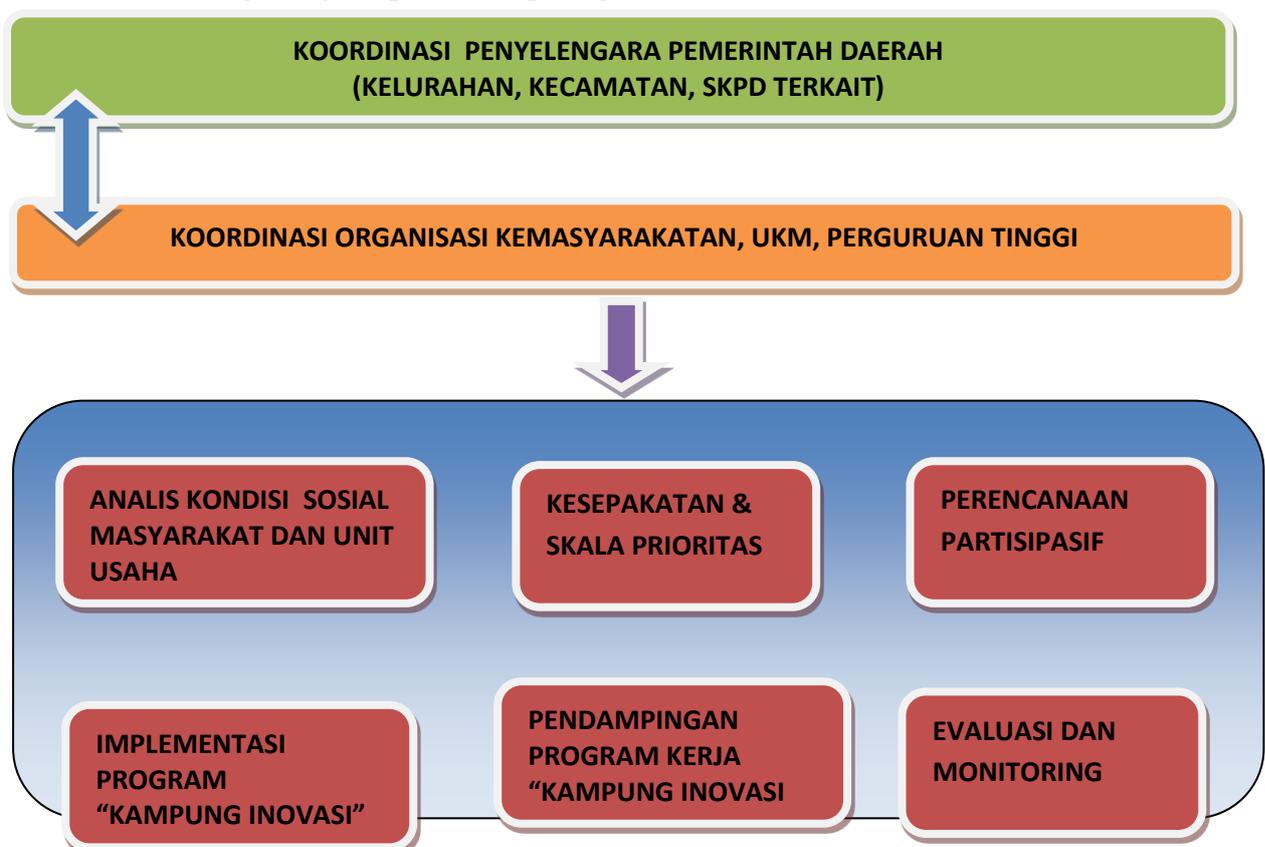
yang diharapkan akan menjadi contoh bagi daerah lain guna menerapkan model inovasi bagi daerahnya masing-masing.

Untuk mempercepat pertumbuhan desa inovatif, diperlukan peran lembaga kolaboratif dengan konsep triple helix, yaitu Akademisi, Bisnis dan Government (ABG). Kemajuan sebuah kegiatan ekonomi (bisnis), tidak terkecuali bisnis yang melibatkan masyarakat pedesaan, akan sangat tergantung dari sinergi para aktor ABG tersebut (Endan S dkk, 2015)

Selanjutnya menurut Wilopo (2015) ada tiga faktor yang dapat mempercepat pembangunan di sebuah desa yaitu inovasi, jiwa wirausaha dan teknologi baru. Inovasi tidak serta merta berbicara tentang produk baru, tetapi bisa juga dengan melakukan hal lama dengan cara-cara yang baru. Amerika dan Tiongkok adalah contoh negara yang berhasil mengembangkan inovasi di desa-desa yaitu dengan menggelar acara Young Entrepreneur in Village. Ada beberapa strategi yang dapat dipraktikkan dalam mengembangkan desa inovatif, di antaranya:

1. Membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis. Proses pembentukan bangunan warga dan organisasi masyarakat sipil biasanya dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mengancam hak publik. Meski demikian, keduanya adalah modal penting bagi desa untuk membangun kedaulatan dan titik awal terciptanya komunitas warga desa yang nantinya akan menjadi kekuatan penyeimbang atas munculnya kebijakan publik yang tidak responsif masyarakat.
2. Memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini :



Model Gambar 3 Model Pengembangan Kampung sebagai Desa Inovatif

5. Kesimpulan dan Saran

Kota Palembang memiliki peluang untuk menjadi kota inovatif, dikarenakan kreatifitas masyarakatnya cukup tinggi serta dukungan pekerja disektor non formal serta heterogen masyarakatnya. Masalah-masalah sosial harus menjadi perhatian perangkat pemerintah daerah, apabila tingkat kemiskinan tidak dapat dikurangi. Untuk membangun kemandirian dalam mewujudkan kampung/desa inovatif, pemerintah tidak dapat melakukannya sendiri perlu melibatkan semua *stakeholder* yang terkait. Membangun di mulai dari masyarakat itu sendiri secara mandiri dengan dukungan pemerintah dan harus dilakukan melalui langkah-langkah kecil yang dapat memberikan dampak besar dan ber-“efek bola salju” dalam memunculkan gerakan-gerakan dengan semangat yang sama: Mewujudkan Kemandirian masyarakat dengan peningkatan daya saing pedesaan dalam menghadapi berbagai dinamika global melalui pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraannya. Perlu dibangun *Capacity Building* untuk sumberdaya manusia pendukung dan pengarahan untuk keluar dari pola hidup subsisten

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kota Palembang. 2015
- Endan S dkk, 2015, Kajian Penguatan Lembaga Kolaboratif dalam Penguatan Desa Inovatif di Provinsi Banten , Peneliti Badan Litbang Daerah Provinsi Banten, KP3B Serang
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2016
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. Metode Penelitian Survei. Jakarta : PT Pustaka LP3ES Indonesia
- Undang-Undang Nomor 72/ 2005 tentang Desa.
- Wilopo, (2015). (<http://prasetya.ub.ac.id/berita/Local-Wisdom-Jadi-Kekuatan-Utama-PengembanganDesa-17491-id.html>).
- www.bappeda.sumselprov.go.id/
- www.bappenas.go.id